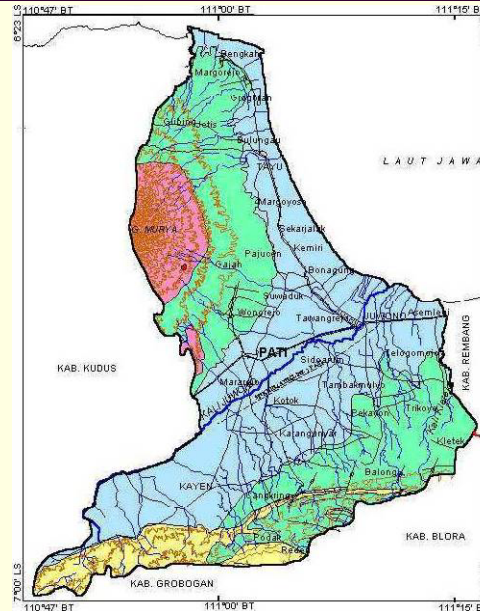


Tugas Bamus dan Panggar DPRD



Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Dr. Wahyudi Kumorotomo
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

Website: www.kumoro.staff.ugm.ac.id

E-mail: kumoro@map.ugm.ac.id

Alat Kelengkapan DPRD

(ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan Anggaran (Panitia Anggaran / Panggar)
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Beberapa Catatan #1

1. Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem *checks & balances* (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah?
2. Pertanggungjawaban: LPJ menjadi LKPJ → peran dlm perubahan kebijakan berkurang?
3. Review Perda oleh Depdagri (pengawasan represif)
4. Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Panggar (alat kelengkapan)
5. Pimpinan dewan *ex-officio* dlm Bamus & Panggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?

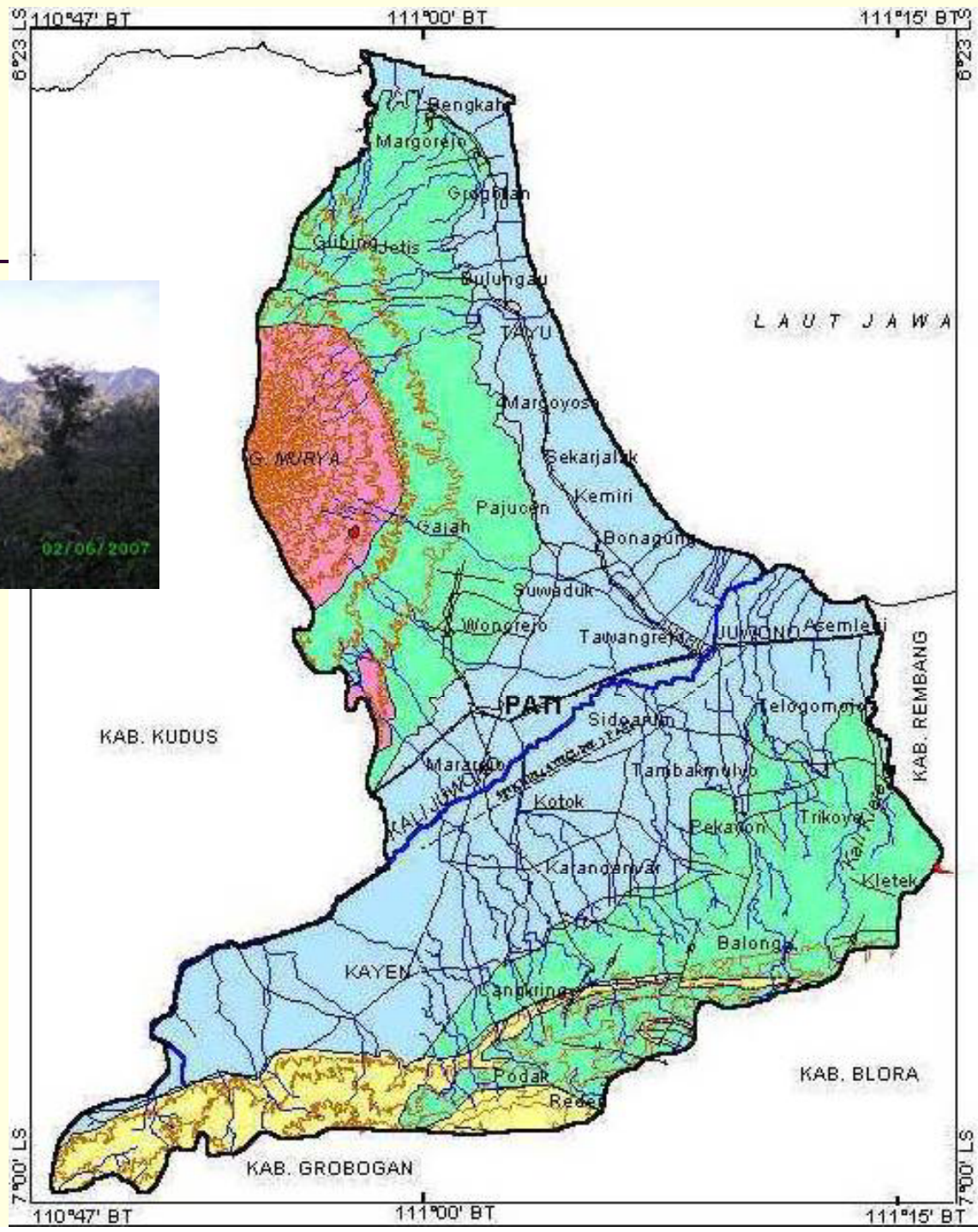
Tugas Pokok

- Bamus: menentukan agenda legislasi, menyerap aspirasi masyarakat untuk dibahas dalam forum dewan.
- Panggar: menentukan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara), bekerjasama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) merumuskan kebijakan anggaran yang sesuai kebutuhan daerah.

MASALAH UMUM

di Kabupaten Pati (Agenda Legislasi)

1. Penduduk di bawah garis kemiskinan
2. Pengangguran
3. Rendahnya daya saing produk daerah
4. Produktivitas pertanian
5. Akses layanan pendidikan & kesehatan
6. Penegakan hukum & reformasi birokrasi
7. Dukungan infrastruktur
8. Bencana alam
9. Kesenjangan antar wilayah.



Tabel 1. Kesenjangan Antar-Wilayah

NO	KECAMATAN	KONTRIBUSI TERHADAP PDRB KABUPATEN	
		(Rp. 000)	(%)
1	Juwana	792.906.206,17	15,25
2	Pati	508.447.944,17	9,78
3	Sukolilo	309.986.610,95	5,96
4	Margoyoso	305.157.396,03	5,87
5	Tayu	300.183.247,93	5,77
6	Gembong	256.359.051,13	4,93
7	Kayen	232.632.801,50	4,47
8	Trangkil	231.976.329,28	4,46
9	Margorejo	219.853.975,53	4,23
10	Batangan	218.529.575,97	4,20
11	Gabus	208.681.917,69	4,01
12	Cluwak	191.550.697,10	3,68
13	Jaken	191.109.272,10	3,67
14	Winong	181.739.435,40	3,49
15	Wedarijaksa	176.481.917,38	3,39
16	Tambakromo	176.060.947,59	3,39
17	Tlogowungu	167.771.832,20	3,23
18	Pucakwangi	143.675.798,39	2,76
19	Dukuhseti	134.477.866,53	2,59
20	Gunungwungkal	131.510.996,83	2,53
21	Jakenan	121.278.000,47	2,33
	JUMLAH	5.200.371.820,34	100

Sumber : PDRB Tingkat Kecamatan Kabupaten Pati Tahun 2005

Produk Legislasi DPRD Pati 2009

1. Perda No.1/2009: APBD
2. Perda No.2/2009: Pajak Penerangan Jalan
3. Perda No.3/2009: Pajak Hotel
4. Perda No.4/2009: Pajak Restoran
5. Perda No.5/2009: Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Perda No.6/2009: Retribusi Penyedot Limbah → Perubahan Perda No.7/1999
7. Perda No.7/2009: Retribusi Parkir → Perubahan Perda No.8/1999
8. Perda No.8/2009: Retribusi Potong Ayam
9. Perda No.9/2009: Retribusi Pelayanan Pasar
10. Perda No.10/2009: Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas Pasar
11. Perda No.11/2009: Retribusi Grosir / Pertokoan
12. Perda No.12/2009: Retribusi Izin Usaha Perdagangan
13. Perda No.13/2009: Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

HIPOTETIS

Analisis Stakeholders

- **DPRD**
Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD)
- **KEPALA DAERAH**
Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? (+ visi KDH terwujud)
- **TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD**
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E)
- **SKPD**
Getting money first
- **PIMPINAN KEGIATAN**
Berhemat dan mampu meng-SPJ-kannya
- **MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI**
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

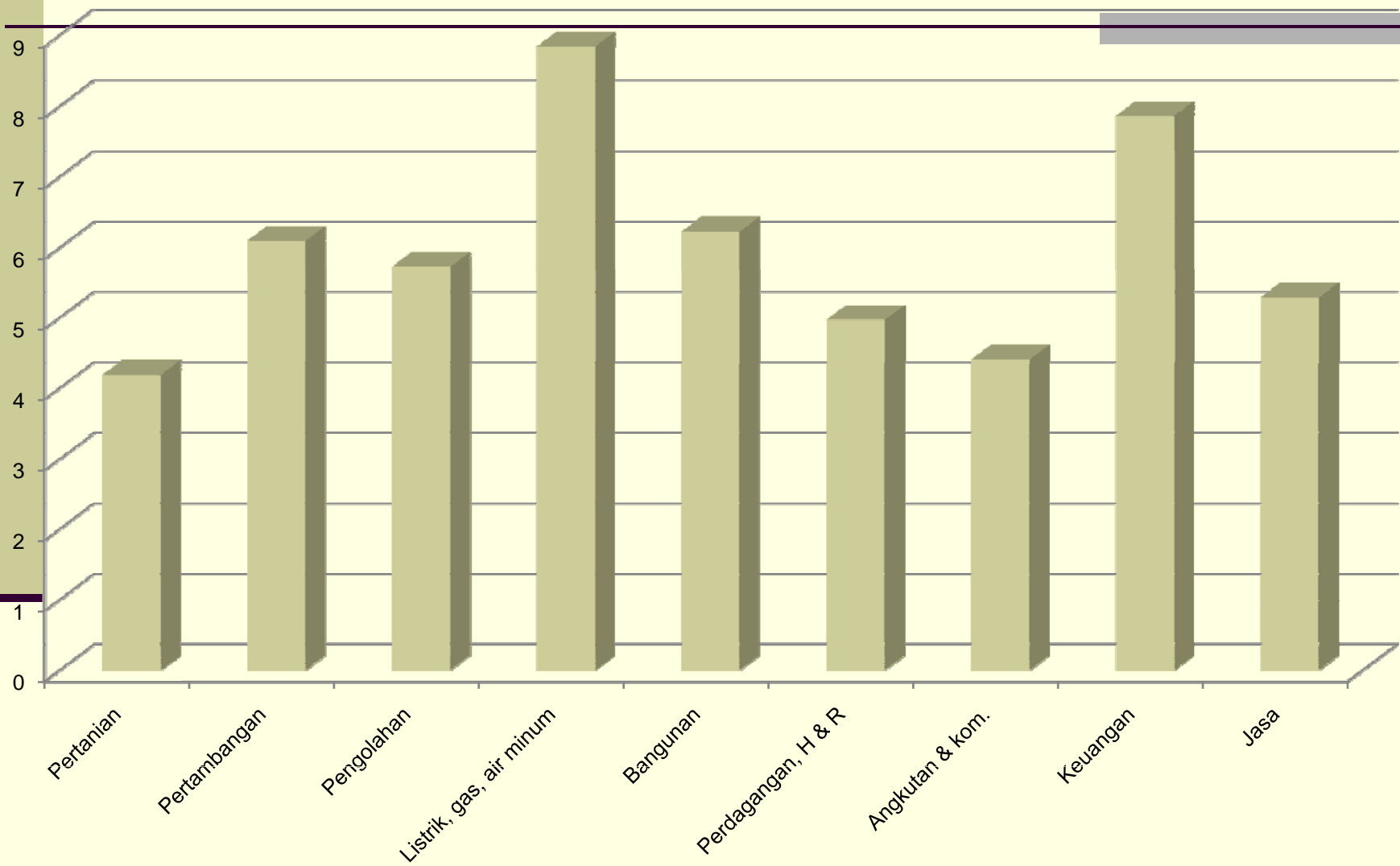
Tabel 2. APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009

Uraian		Jumlah (ribuan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		888.470.974	
	Pendapatan Asli Daerah	70.623.592	7,1
	Dana Perimbangan	737.321.847	74,8
	Lain-lain Pendapatan	50.525.535	5,1
Total Belanja		985.495.864	100
Belanja Tidak Langsung		646.875.275	65,6
	Belanja pegawai	563.870.806	57,2
	Hibah	16.226.346	
	Bantuan sosial	11.571.500	
	Bagi hasil	780.350	
	Bantuan keuangan	44.873.208	
	Belanja tidak terduga	9.553.065	
Belanja Langsung		338.620.589	34,4
	Belanja pegawai	19.260.581	
	Belanja barang & jasa	163.656.254	
	Belanja modal	155.703.754	15,8
Pembiayaan Daerah		151.565.172	
	SiLPA	132.795.032	13,4
	Pengeluaran	12.270.141	
Defisit		127.024.891	

Tantangan Belanja Tidak Langsung

1. Kenaikan gaji PNS
2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Tengah
4. Kenaikan Alokasi Dana Desa

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pati Menurut Lapangan Usaha Th. 2007 (%)



Tabel 3. Proporsi Kontributor PDRB Tahun 2003-2006 (Harga Konstan 2000)

No	Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	Perubahan 2003-2006
1	Pertanian	35,22	34,77	34,20	33,62	- 1,60
2	Pertambangan dan Penggalian	0,78	0,77	0,76	0,79	0,01
3	Industri Pengolahan	19,42	19,76	20,02	20,24	0,82
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,97	1,07	1,09	1,13	0,16
5	Bangunan	5,95	6,05	6,28	6,44	0,49
6	Perdagangan, restoran dan Hotel	19,66	19,49	19,38	19,32	- 0,34
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,18	4,11	4,10	4,10	- 0,08
8	Keuangan, Sewa dan Jasa usaha	6,37	6,52	6,63	6,74	0,37
9	Jasa-jasa	7,43	7,47	7,54	7,61	0,18
	PDRB Kabupaten Pati	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BPS, 2006

Tabel 4. Alokasi Belanja Langsung Pemda Kabupaten Pati (%)

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Alokasi Dana (dalam %)					Rata-rata
		2002	2003	2004	2005	2006	
1	SETWAN	1,01	0,41	1,51	1,53	2,15	1,32
2	SETDA	10,41	10,55	10,96	9,33	12,29	10,71
3	KAPENDA	1,18	1,32	1,28	3,31	2,17	1,85
4	BAPPEDA	1,64	1,42	1,59	0,99	1,14	1,36
5	BANWAS	0,43	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39
6	BKD	1,04	1,91	0,74	0,78	1,01	1,09
7	SATPOL	0,28	0,29	0,34	0,38	0,51	0,36
8	ARSIP	0,10	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11
9	KAYANDU	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
10	LITBANG	0,19	0,24	0,17	0,14	0,13	0,18
11	DISTANAK	2,12	1,65	1,62	1,52	1,73	1,73
12	DISLAUTKAN	1,08	0,63	0,51	0,97	1,11	0,86
13	DISHUTBUN	0,93	1,01	0,77	0,69	1,01	0,88
14	DISPERINDAG	0,73	0,74	0,69	0,83	0,55	0,71
15	KANPPAS	1,22	1,18	0,92	0,92	0,85	1,02
16	KANKOP	0,00	0,08	0,20	0,19	0,22	0,14
17	DISNAKERTRANS	1,06	0,90	0,91	0,83	0,73	0,89
18	DKK	5,54	4,75	4,60	5,28	7,92	5,62
19	BRSD	6,77	6,40	8,01	7,14	5,68	6,80
20	DISDIK	48,54	47,47	49,22	48,78	44,35	47,67
21	DISKESOSPERMAS	1,96	1,87	0,70	0,56	0,56	1,13
22	KESBANGLINMAS	0,00	0,07	1,57	0,17	0,28	0,42
23	DISKIMPRAS	12,32	14,66	10,12	9,29	11,10	11,50
24	DIHUBPAR	0,88	0,85	0,92	1,05	0,75	0,89
25	KANPEDALDA	0,26	0,27	0,18	0,24	0,30	0,25
26	KANDUKCAPIL	0,21	0,59	0,60	0,51	0,53	0,49
27	KB & KS	0,00	0,00	1,10	1,20	1,21	0,70
28	DISTAN	0,00	0,14	0,16	2,78	1,09	0,83
	JUMLAH	100	100	100	100	100	

Isu Pokok Kebijakan Publik di Kabupaten Pati

- Kondisi geografis yang kurang menguntungkan (kontur, daerah transit, SDA terbatas, komunikasi ke luar kurang intensif)
- Infrastruktur penunjang komoditas agri-bisnis dan industri kecil
- Tingkat pendidikan masyarakat rendah (penduduk 1.189.200 jiwa; pencari kerja: 62,8% lulus SMA, 16,4% lulus S1, 10,5% lulus Diploma, 10,4% lulus SD/SMP)
- Modal pokok: kultur, stabilitas politik, komitmen perumus kebijakan. → Bagaimana pengembangan di masa mendatang?

Peran Pokok Wakil Rakyat

- Pertimbangkan seluruh warga masyarakat, bukan hanya konstituen.
- Budaya “nrimo” adalah modal bagi stabilitas politik, tetapi hindari budaya “sak karepku” atau “mumpung isih njabat”.
- Masyarakat Pati memiliki jiwa seni yang tinggi.
→ potensi pariwisata?
- Tingkatkan belanja modal dari anggaran, buat program yg langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat.
- Rumuskan program berbasis agri-bisnis dan industri pengolahan.

Kedudukan sebagai Wakil Rakyat
adalah amanah.

Inilah saatnya untuk mengabdikan
kepada rakyat Kabupaten Pati.

TERIMA KASIH